**Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi
Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan
Di kabupaten Majene**

Sri Astuty Ratnasari Manggu Dan Heriani

**Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat, Sulawesi Barat-Indonesia
Email: sriastutyrm@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Data penelitian ini diperoleh dari pembagian kuesioner. Penelitian ini berdasarkan hasil output SPSS yang dilihat dari nilai signifikansi, nilai yang diperoleh adalah 0,037 lebih kecil dari standar yang digunakan yakni $0,037 < 0,05$. Selain dari nilai signifikansi, dapat dilihat juga dari perbandingan nilai t hitung dan t tabel. Berdasarkan hasil output diperoleh nilai t hitung sebesar 2,116 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,984. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu $2,116 > 1,984$ maka hipotesis (H1) diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variable tingkat pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Kata Kunci : Tingkat Pemahaman, Wajib Pajak Orang Pribadi, Kewajiban Perpajakan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. *Self assessment system* juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menhadapi pemeriksaan. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

Menurut Sumarsa (2012), “Pajak adalah Perikatan oleh Wajib Pajak dengan negara secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan”. Sebenarnya, pajak merupakan yang lahir dari undang-undang yang bernuansa publik sehingga bersifat memaksa. Pajak berada dalam pengawasan pejabat pajak sebagai pihak yang mewakili negara secara langsung kepada Wajib Pajak. Sifat yang dimiliki oleh Wajib Pajak adalah bersifat memaksa dan terjelma dari aspek penagihannya dengan ancaman hukuman berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Numantu yang dikutip dalam Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kondisi menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan.

B. Rumusan Masalah

Seberapa besar pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Majene?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Majene.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner yang kemudian dilakukan pengolahan secara statistik dengan menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh variabel X yaitu tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Majene. Berikut adalah tabel persebaran kuisioner pada setiap daerah di Kabupaten Majene:

Tabel 1. Jumlah Persebaran Kuesioner

NO	Daerah Penyebaran Kuesioner	Jumlah yang Disebarkan	Jumlah yang Kembali	Jumlah yang Tidak Kembali
1	Sendana	25 Kuesioner	25 Kuesioner	-
2	Pamboang	25 Kuesioner	25 Kuesioner	-
3	Banggae	25 Kuesioner	25 Kuesioner	-
4	Banggae Timur	25 Kuesioner	25 Kuesioner	-
	JUMLAH	100 Kuesioner	100 Kuesioner	0 Kuesioner

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdapat di daerah-daerah Majene meliputi: WP OP Sendana, WP OP Pamboang, WP OP Banggae, dan WP OP Banggae Timur, dengan jumlah wajib pajak berjumlah 3.402 WP OP. Lokasi pengambilan sampel berada di wilayah Kabupaten Majene. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampel dengan metode *Convenience Sampling* atau sampel yang mengambil secara acak dengan menghampiri setiap orang yang berada dalam lokasi yang sama.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dari penelitian ini diukur dengan indikator yang digunakan pada penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yang terdiri dari 7 pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel kepatuhan wajib pajak dari jawaban kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Deskriptif Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

Skor Pernyataan	(1) Sangat tidak setuju		(2) Tidak setuju		(3) Kurang setuju		(4) Setuju		(5) Sangat setuju	
	Σ	(%)	Σ	(%)	Σ	(%)	Σ	(%)	Σ	(%)
1	0	0%	0	0%	0	0%	43	43%	57	57%
2	0	0%	0	0%	0	0%	51	51%	49	49%
3	0	0%	0	0%	0	0%	51	51%	49	49%
4	0	0%	0	0%	0	0%	53	53%	47	47%
5	0	0%	0	0%	0	0%	53	53%	47	47%
6	0	0%	1	1%	18	18%	37	37%	44	44%
7	0	0%	0	0%	0	0%	49	49%	51	51%
Jumlah	0		1		18		337		344	

Berdasarkan table 2 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang menjadi sampel paling banyak memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan tentang kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan 4 sebanyak 51 responden (51%) menjawab setuju. Tidak satupun responden menjawab pernyataan kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju dalam pernyataan 4. Artinya sesuai dengan pernyataan 4 Wajib Pajak telah menjaga ketertiban administrasi perpajakan dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan Wajib Pajak patuh kegiatan perpajakan. Demikian juga pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, tak satupun responden menjawab pernyataan sangat tidak setuju. Dapat dikatakan Wajib Pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pada Wilayah Kabupaten Majene.

Jumlah seluruh jawaban setiap pernyataan tentang kepatuhan Wajib Pajak untuk kategori sangat setuju adalah 344 jawaban, setuju 337 jawaban, kurang setuju adalah 18 jawaban, kurang setuju 1 jawaban dan sangat tidak setuju 0 jawaban. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan- pernyataan tentang kepatuhan wajib pajak, maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tinggi.

B. Statistik Deskriptif Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan pada penelitian ini diukur dengan indikator yang terdiri dari 6 pernyataan. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Deskriptif Frekuensi Pemahaman Peraturan Pajak

Skor Pernyataan	(1) Sangat tidak setuju		(2) Tidak setuju		(3) Kurang setuju		(4) Setuju		(5) Sangat setuju	
	Σ	(%)	Σ	(%)	Σ	(%)	Σ	(%)	Σ	(%)
1	0	0%	0	0%	4	4%	56	56%	40	40%
2	0	0%	0	0%	0	0%	59	59%	41	41%
3	0	0%	0	0%	7	7%	58	58%	35	35%
4	0	0%	0	0%	9	9%	67	26%	24	24%
5	0	0%	0	0%	26	26%	44	44%	30	30%
6	0	0%	0	0%	17	17%	56	56%	27	27%
Jumlah	0		0		63		340		197	

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang menjadi sampel, responden paling banyak memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan tentang pemahaman peraturan perpajakan. Pada pernyataan 2 sebanyak 59 responden (59%) menjawab setuju, artinya wajib pajak sudah memahami terkait dengan pernyataan wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Jumlah seluruh jawaban dari setiap pernyataan tentang kepatuhan Wajib Pajak untuk kategori sangat setuju adalah 197 jawaban, setuju 340 jawaban, kurang setuju 63 jawaban, sedangkan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada jawaban. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan-pernyataan tentang pemahaman peraturan perpajakan. Hal ini dapat diartikan responden telah memahami tentang aturan yang berlaku untuk wajib pajak dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan maka dapat dikatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Analisis Regresi Linear

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25.661	2.634		9.741	.000
Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan	.219	.103	.209	2.116	.037

a. Dependent Variable: Tingkat pemahaman

Dapat ditentukan persamaan regresinya berdasarkan kolom B yang merupakan koefisien regresi tiap variabelnya. Jadi persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 25,661 + 0,219X$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar 25,661; artinya apabila X, nilainya 0 nilai Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 25,661%
- b) Koefisien regresi variabel X sebesar 0,219; artinya apabila X dinaikkan 1%, maka nilai Kepatuhan wajib pajaknya akan mengalami peningkatan sebesar 0,219% dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.

D. Pengujian Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25.661	2.634		9.741	.000
Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan	.219	.103	.209	2.116	.037

a. Dependent Variable: Tingkat pemahaman

a) Hipotesis

H_0 = tingkat pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H_1 = tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

b) Tingkat Signifikan

Tingkat Signifikan yang digunakan adalah 0.05 ($\alpha = 5\%$), berdasarkan tabel 4.5. signifikansi variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,037. Artinya tingkat signifikansi variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan lebih kecil dari standar signifikansi, sehingga dapat dikatakan bahwa H_1 diterima.

c) Menentukan t hitung

Menentukan t hitung dari tabel 4.5 berdasarkan tabel hasil diatas, maka t hitung variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan sebesar 2,116.

d) Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$: $2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) = $n - k - 1$ atau $100 - 2 - 1 = 97$. Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0.025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,984.

e) Kriteria pengujian

H_0 diterima jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$

H_0 ditolak jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

- f) Membandingkan t hitung dengan t tabel
Nilai t hitung > t tabel ($2,116 > 1,984$)

Berdasarkan hasil output SPSS yang dilihat dari nilai signifikansi, nilai yang diperoleh adalah 0,037 atau 37,0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan, hal tersebut diperkuat karena tingkat signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari standar yang digunakan yakni $0,037 < 0,05$. Selain dari nilai signifikansi, dapat dilihat juga dari perbandingan nilai t hitung dan t tabel. Berdasarkan hasil output diperoleh nilai t hitung sebesar 2,116 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,984. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu $2,116 > 1,984$ maka hipotesis (H1) diterima.

Berdasarkan kedua perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil output SPSS yang dilihat dari nilai signifikansi, nilai yang diperoleh adalah 0,037 lebih kecil dari standar yang digunakan yakni $0,037 < 0,05$. Selain dari nilai signifikansi, dapat dilihat juga dari perbandingan nilai t hitung dan t tabel. Berdasarkan hasil output diperoleh nilai t hitung sebesar 2,116 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,984. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu $2,116 > 1,984$ maka hipotesis (H1) diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: konsep, teori dan isu*. Jakarta: Kencana.
- Ghoni, Husen Abdul. 2012. *Pengaruh Motivasi Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*. Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 1 Tahun 2012. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Purwono, Herry 2010 “*Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*” Jakarta: Erlangga.
- S. R, Soemarso. 2007. *Perpajakan, pendekatan komprehensif*. Jakarta: Salemba
- Sumarsa (2012:4) *Kepatuhan dan Kesadaran Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widayati dan Nurlis, SE.AK.Msi. 2010. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga)*”. Dalam *Symposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010: Universitas Yadnyana, I Ketut dan Sudiksa, Ida Bagus. Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Dalam Jurnal Akuntansi Vol. 17 No. 2, 2011. Jenderal Soederman.